

**Judul** : Demi KDMP berjalan efektif, senayan minta menteri koperasi rajin blusukan  
**Tanggal** : Kamis, 18 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Demi KDMP Berjalan Efektif

## Senayan Minta Menteri Koperasi Rajin Blusukan

KALANGAN politisi Senayan meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat dukungan permodalan, pendampingan, dan sosialisasi terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Tujuannya agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan efektif dan tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan.

Anggota Komisi VI DPR Nurwayah menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran Kemenkop Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,34 triliun. "Dukungan anggaran tersebut penting untuk memperkuat pelaksanaan program KDMP yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah," ujar Nurwayah, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun, ia mengingatkan agar alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan koperasi di lapangan. Utamanya terkait permodalan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, banyak koperasi yang memiliki semangat dan kesungguhan untuk berkembang, tapi belum mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari sisi permodalan maupun sarana pendukung.

Ia mencontohkan kondisi KDMP di Kelurahan Kojja, Jakarta Utara. Koperasi tersebut beroperasi di lokasi yang terbatas dan dibangun secara mandiri oleh para pengurus tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

Begitu juga dengan sejumlah

kebutuhan dasar masyarakat yang belum dapat dipenuhi koperasi karena keterbatasan pasokan barang dan dukungan usaha. "Jangan sampai ada koperasi yang memiliki kemauan kuat untuk berkembang tetapi tidak mendapatkan perhatian," kata politikus Demokrat ini mengingatkan.

Sebaliknya, kata dia, ada juga fasilitas KDMP yang sudah dibangun di sejumlah wilayah tetapi tidak didukung kemampuan SDM yang memadai. "Ini harus menjadi perhatian," imbuh legislator asal DKI Jakarta ini.

Untuk itu, ia meminta Kemenkop lebih aktif blusukan, melakukan pendataan dan kunjungan langsung ke daerah untuk memetakan kondisi riil koperasi yang telah terbentuk, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan berbasis kebutuhan lapangan penting agar bantuan Pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Selain itu, ia menyoroti porsi anggaran fasilitasi permodalan dan pembiayaan koperasi yang masih relatif kecil dibanding kebutuhan pengembangan koperasi di berbagai daerah. Karena itu, perlu langkah preventif melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan sebelum pengawasan dilakukan secara ketat.

Ia menekankan yang perlu diperkuat terlebih dahulu adalah pemahaman masyarakat tentang tata kelola koperasi yang baik. "Kita cegah dulu potensi masalahnya melalui pembinaan dan



Nurwayah

sosialisasi, baru kemudian dilakukan pengawasan," imbuhnya.

Nurwayah mengingatkan minimnya pemahaman pengelola Koperasi dapat berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari. Karena itu, Kemenkop harus meningkatkan program edukasi dan pendampingan agar pengurus koperasi memiliki kapasitas yang cukup dalam menjalankan usaha dan mengelola keuangan secara akuntabel.

"Koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Dukungan Pemerintah harus benar-benar dirasakan koperasi yang ada di tingkat desa," harap dia.

Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo menginginkan KDMP menjadi wadah utama pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Keberadaan koperasi yang digagas Pemerintah tersebut harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha rakyat dan tidak hanya menjadi tempat penjualan produk-produk pabrikan.

Menurutnya, target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 10 juta pelaku UMKM membutuhkan terobosan yang mampu membuka akses pasar secara luas. "Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem KDMP," usul Yoyok di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Yoyok mengingatkan agar KDMP tidak berkembang menjadi sekadar jaringan toko ritel yang menjual produk-produk pabrikan. Karena model seperti itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan itu, Yoyok berharap KDMP difokuskan untuk menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau dan memprioritaskan bagi produk-produk UMKM lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi barang, tetapi juga menjadi pasar yang mampu menyerap hasil produksi pelaku usaha kecil.

Karena itu, Pemerintah harus memastikan KDMP benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menambah saluran dis-

tribusi bagi produk-produk besar. "Yang dibutuhkan UMKM itu produknya laku terjual dan menghasilkan keuntungan. Jadi akses pasar harus menjadi prioritas," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengakui pembangunan fisik KDMP di sejumlah daerah menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan. Karena itu, Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap dan tidak lagi berorientasi pada pencapaian 80 ribu titik dalam waktu singkat.

"Kami sudah menyampaikan kepada Presiden pelaksanaannya dilakukan bertahap. Untuk sementara kami fokus pada sekitar 40 ribu titik yang dinilai lebih realistis untuk dikembangkan," ujar Ferry di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry menyebut, saat ini sebanyak 12.533 KDMP telah selesai dibangun, sementara 22.737 sisanya masih dalam proses konstruksi. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35 ribu titik.

Menurutnya, fase operasional kini menjadi tantangan yang lebih penting dibanding pembangunan fisik semata. "Pemerintah telah memulai uji operasional di sejumlah wilayah, termasuk peluncuran operasionalisasi 1.061 KDMP di Kabupaten Bandung," tutupnya. ■ TIF